

# Analisis Dampak Penerapan SAK Entitas Privat terhadap Penyusunan Laporan Keuangan PT X

Hakiima Ghina Izzati<sup>1)</sup>, Yenni Nuraeni<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: [hakiima.ghinaizzati.ak18@mhs.w.pnj.ac.id](mailto:hakiima.ghinaizzati.ak18@mhs.w.pnj.ac.id)

<sup>2)</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: [yenni.nuraeni@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:yenni.nuraeni@akuntansi.pnj.ac.id)

---

## ABSTRACT

*The Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) has established four Financial Accounting Standards (SAK) as the basis for preparing financial statements in Indonesia. However, DSAK IAI considers that SAK ETAP is no longer able to cover the actual state of the company at the present time. Therefore, DSAK IAI decided to issue SAK EP to replace SAK ETAP. The purpose of this research is to analyze the impact of the implementation of SAK Entitas Privat on the preparation of PT X's the financial statements. The form of this research is descriptive qualitative using primary data and secondary data. Data were collected using interview and documentation. The results of this research indicate that the application of SAK EP to financial statements provides changes in the accounts and information presented. These changes include the appearance of current and deferred taxes and their effect on profit (loss) for the year. Furthermore, there is a reclassification of the accrued expenses account into short-term employee benefits liabilities and short-term post-employment benefits liabilities. The application of SAK EP causes the financial statements to be more comprehensive than the application of SAK ETAP.*

**Keywords:** SAK Entitas Privat; Financial Statements; SAK ETAP.

---

## ABSTRAK

Dewan Standar Akuntan Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan empat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Namun, DSAK IAI menilai bahwa SAK ETAP sudah tidak dapat mencakup keadaan perusahaan yang sebenarnya di masa sekarang. Sehingga, DSAK IAI memutuskan untuk mengeluarkan SAK EP menggantikan SAK ETAP. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak penerapan SAK Entitas Privat terhadap penyusunan laporan keuangan PT X. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EP terhadap laporan keuangan memberikan perubahan dalam akun dan informasi yang disajikan. Perubahan tersebut di antaranya terlihatnya pajak kini dan pajak tangguhan serta efeknya terhadap laba (rugi) tahun berjalan. Selanjutnya terdapat reklasifikasi dari akun biaya yang masih harus dibayar menjadi liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas

imbalan pasca kerja jangka pendek. Penerapan SAK EP menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih komprehensif dibandingkan dengan penerapan SAK ETAP.

**Kata-Kata Kunci:** SAK Entitas Privat; Laporan Keuangan; SAK ETAP.

---

## **PENDAHULUAN**

### *Latar Belakang*

Laporan keuangan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan situs resmi IAI, IAI membagi standar atas laporan keuangan menjadi empat bagian, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan SAK Syariah (SAK Syariah).

Berdasarkan situs resmi IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada tanggal 30 Juni 2021. SAK EP ini merupakan hasil adopsi dari IFRS *for* SMEs dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Dengan sahnya SAK EP, maka entitas yang sebelumnya telah menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan harus menggunakan SAK EP dan tidak dapat menerapkan SAK EMKM.

PT X merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil pakaian. PT X termasuk dalam entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik sehingga selama ini PT X telah menggunakan SAK ETAP sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan diberlakukannya SAK EP, maka PT X termasuk ke dalam entitas yang wajib untuk menerapkan SAK EP. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada situs resmi IAI, SAK EP lebih sederhana daripada SAK Umum yang berbasis IFRS namun memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP.

Dengan membandingkan SAK ETAP dan SAK EP, maka peneliti dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai perbedaan SAK ETAP dan SAK EP serta dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan entitas apabila menerapkan SAK EP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Penerapan SAK Entitas Privat terhadap Penyusunan Laporan Keuangan PT X”.

### *Permasalahan*

Berdasarkan situs resmi IAI, DSAK IAI telah mengesahkan SAK Entitas Privat yang akan menggantikan SAK ETAP. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan diizinkan penerapan dini mulai 1 Januari 2022. Dikarenakan SAK EP yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP, maka diperlukannya analisis dari dampak penerapan SAK Entitas Privat terhadap penyusunan laporan keuangan PT X.

### *Tujuan*

Merujuk pada permasalahan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan SAK Entitas Privat terhadap penyusunan laporan keuangan PT X.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *Perseroan Terbatas*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

### *SAK Entitas Privat*

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat), SAK Entitas Privat ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK Entitas Privat jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat. Selain itu, entitas anak yang entitas induknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau merupakan bagian dari kelompok konsolidasian yang menggunakan SAK tidak dilarang menggunakan SAK Entitas Privat untuk laporan keuangannya sendiri jika entitas anak tersebut memenuhi persyaratan.

### *Perbedaan SAK ETAP dan SAK Entitas Privat*

SAK Entitas Privat berisikan 35 bab sedangkan SAK ETAP hanya memiliki 30 bab. Pertambahan total bab dalam SAK EP karena adanya bab tersendiri yang mengatur Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*, Hibah Pemerintah, Hiperinflasi, dan Aktivitas Khusus. Selain itu, Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu di SAK ETAP dibagi menjadi dua bab di dalam SAK EP, yaitu Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar dan Bab 12 Isu Terkait Instrumen Keuangan Lain. Terdapat pula dua bab di SAK ETAP yang menjadi satu bab di SAK EP. Dua bab tersebut adalah Bab 25 Mata Uang Pelaporan dan Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing dan menjadi satu bab di Bab 30 Penjabaran Valuta Asing.

### *Pajak Kini dan Pajak Tangguhan*

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak penghasilan tahun berjalan yang kurang bayar atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar disebut sebagai aset pajak kini.

Pajak tangguhan timbul dikarenakan adanya perbedaan temporer pada rekonsiliasi fiskal. Pajak tangguhan terbagi menjadi aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul karena beda temporer yang berkemungkinan dapat mengurangi besarnya pajak di masa yang akan datang. Di lain sisi, liabilitas pajak tangguhan diakui karena adanya beda temporer kena pajak yang dapat menambah besarnya pajak di masa yang akan datang.

### *Imbalan Kerja*

Berdasarkan SAK Entitas Privat bab 28 mengenai Imbalan Kerja, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Imbalan kerja yang dicakup oleh SAK Entitas Privat merupakan imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya dan pesangon.

## **METODE PENELITIAN**

### *Jenis Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan PT X.

### *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi sebagai data primer serta dokumentasi sebagai data sekunder. Data primer yang didapatkan dari wawancara bersumber dari Manajer Akuntansi Bapak SN. Data sekunder yang didapatkan berupa SAK Entitas Privat, SAK ETAP, PSAK 24, dan PSAK 46 yang dikeluarkan oleh IAI serta laporan keuangan PT X.

### *Metode Analisis Data*

Penelitian ini menerapkan metode analisis data versi Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan.

- Pengumpulan Data
  - Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dalam kegiatan operasional dan keuangan PT X.
  - Pengumpulan dokumen dan berkas yang berhubungan dengan penelitian.
- Reduksi Data
  - Mengelompokkan informasi yang telah didapatkan berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian untuk dapat dianalisis lebih lanjut.

- Penyajian Data
  - Menyusun kembali laporan keuangan PT X yang berdasarkan SAK ETAP menjadi laporan keuangan berdasarkan SAK Entitas Privat.
  - Apabila data yang diperoleh kurang atau tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pengambilan data tambahan.
  - Melakukan analisis dari kedua laporan keuangan Privat untuk mengetahui dampak dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK Entitas Privat.
- Kesimpulan
  - Menarik kesimpulan dan saran penelitian dari hasil analisis yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Perusahaan*

PT X didirikan pada pertengahan tahun 1991 di Jawa Tengah, Indonesia. PT X merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil pakaian. PT X telah menerapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu, laporan keuangan tahun 2020 disajikan berdasarkan SAK ETAP. PT X memiliki aplikasi tersendiri yang khusus dibuat oleh *programmer* untuk menjalankan proses pembukuan dan pelaporan keuangan PT X. Laporan keuangan PT X pun telah diperiksa oleh kantor akuntan publik dan telah dinyatakan wajar dan sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Dikarenakan telah menerapkan SAK ETAP, maka PT X termasuk ke dalam entitas yang diwajibkan untuk mengubah standar yang diterapkan menjadi SAK EP per 1 Januari 2025.

### *Penyusunan Laporan Keuangan PT X Berdasarkan SAK Entitas Privat*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Fotocopy	264.977	448.416
Listrik	10.994.324	15.435.874
Kirim dokumen/paket	6.642.270	30.239.430
Catride plotter	-	770.000
Ekspor	-	5.244.800
Impor	36.545.100	7.339.100
Custom bond	-	5.544.683
Konsultan pajak	83.700.000	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>138.146.671</u></b>	<b><u>65.022.303</u></b>

*Gambar 1 Biaya yang masih harus dibayar*

Selama menerapkan SAK ETAP, pos biaya yang masih harus dibayar juga mengandung akun upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan SAK EP, akun atas upah, gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dikelompokkan tersendiri menjadi imbalan kerja dan imbalan pasca kerja. Maka dari itu, kedua akun tersebut mengalami reklasifikasi dari pos biaya yang masih harus dibayar ke kewajiban imbalan kerja dan imbalan pasca kerja. Pos biaya yang masih harus dibayar pun mengalami penurunan sebesar Rp 548.897.485 pada tahun 2020 dan Rp 530.565.700 di tahun 2019, sesuai dengan gambar 1 mengenai biaya yang masih harus dibayar.

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek		
Upah karyawan	480.161.800	530.565.700
BPJS Ketenagakerjaan	4.084.677	-
	<u>484.246.477</u>	<u>530.565.700</u>
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>484.246.477</u></b>	<b><u>530.565.700</u></b>

Gambar 2 Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain pesangon yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait. Maka dari itu, biaya upah karyawan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan termasuk ke dalam kewajiban imbalan kerja jangka pendek. Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh PT X merupakan program atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Jaminan yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja jangka pendek ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terutang adalah Rp 1,815,412 dan Rp 2,269,265.

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek		
BPJS Ketenagakerjaan	64.651.008	-
	<u>64.651.008</u>	<u>-</u>
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>64.651.008</u></b>	<b><u>-</u></b>

Gambar 3 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Pos kewajiban imbalan pasca kerja terdiri atas kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek dan kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang. Imbalan pasca kerja ialah imbalan kerja selain pesangon yang terutang setelah penyelesaian kontrak kerja. Imbalan pasca kerja mencakup imbalan purnakarya seperti pensiun; dan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa purnakarya dan pelayanan kesehatan purnakarya. Program BPJS Ketenagakerjaan yang diakui sebagai imbalan pasca kerja ialah Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sehingga jumlah iuran yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasca kerja ialah Rp 43,116,041 dan Rp 21,534,967. Dikarenakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan per bulan, maka kedua iuran tersebut termasuk ke dalam kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek.

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Saldo pajak kini awal tahun	966.962.411	-
Laba (rugi) usaha	- 1.909.071.058	592.128.598
PPh terutang atas laba (rugi) usaha	-	- 148.032.149
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	259.237.000	1.091.224.000
PPh Pasal 25	-	23.770.560
	<u>259.237.000</u>	<u>1.114.994.560</u>
Saldo pajak kini akhir tahun	<u>1.226.199.411</u>	<u>966.962.411</u>

Gambar 4 Pajak Kini

Berdasarkan SAK EP, entitas mengakui liabilitas pajak kini untuk pajak terutang atas laba kena pajak untuk periode kini dan periode lalu. Namun apabila jumlah yang dibayarkan melebihi jumlah terutang, maka kelebihan tersebut dapat diakui sebagai aset pajak kini. PT X mengalami kerugian pada tahun 2020 sedangkan terdapat laba sebesar Rp 592,128,598 sehingga terdapat PPh terutang sebesar Rp 148,032,149 yang berasal dari Rp 592,128,598 dikali dengan 25%. Kemudian terdapat kredit pajak masing-masing sebesar Rp 259,237,000 dan Rp 1,114,994,560 untuk tahun 2020 dan 2019. Maka dari itu, PT X dapat mengakui aset pajak kini pada tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp 1,226,199,411 dan 866,962,411. Kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp 259,237,000.

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Saldo pajak tangguhan awal tahun	- 179.776.633	-
Penyesuaian fiskal:		
Penyesuaian fiskal positif	- 64.859.203	- 890.842.094
Penyesuaian fiskal negatif	152.634.737	171.735.561
	<u>87.775.534</u>	<u>- 719.106.533</u>
PPh terutang atas penyesuaian fiskal (selisih koreksi fiskal x tarif pajak) 2020 22%; 2019 25%	<u>19.310.617</u>	<u>- 179.776.633</u>
Saldo pajak tangguhan akhir tahun	<u>- 160.466.016</u>	<u>- 179.776.633</u>

Gambar 5 Pajak Tangguhan

Terdapat dua jenis beda yang menimbulkan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, yaitu beda temporer dan beda permanen. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, sedangkan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan muncul dikarenakan adanya koreksi fiskal positif, sedangkan aset pajak tangguhan timbul karena koreksi fiskal negatif.

Atas dasar laporan fiskal yang sudah diterima PT X, pada tahun 2020 terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 64,859,203 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 152,634,737 sehingga total koreksi fiskal negatif sebesar Rp 87,775,534. Berdasarkan total koreksi fiskal tersebut, dapat terhitung bahwa aset pajak tangguhan untuk tahun 2020 adalah Rp 19,310,617 yang berasal dari Rp 87,775,534 dikali dengan 22%. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 890,842,094 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 171,735,561 sehingga total koreksi fiskal positif sebesar Rp 719,106,533. Berdasarkan total koreksi fiskal tersebut, dapat terhitung bahwa liabilitas pajak tangguhan untuk tahun 2019 adalah Rp

179,776,633 yang berasal dari Rp 719,106,533 dikali dengan 25%. Sehingga apabila diakumulasi, liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh PT X sebesar Rp 160,466,106.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Pendapatan komprehensif</b>		
Pendapatan pajak tangguhan	278.547.617	787.185.778
Pendapatan bunga	274.314	10.113.192
Pendapatan komprehensif lain		
laba (rugi) selisih kurs	<u>2.240.770.708</u>	<u>2.008.452.785</u>
<b>Jumlah pendapatan komprehensif</b>	<u>2.519.592.639</u>	<u>2.805.751.755</u>
<b>Beban komprehensif</b>		
Administrasi bank	- 97.849.797	- 95.834.015
Beban komprehensif lain		
laba (rugi) selisih kurs	<u>- 1.351.002.863</u>	<u>- 1.411.567.211</u>
<b>Jumlah beban komprehensif</b>	<u>- 1.448.852.660</u>	<u>- 1.507.401.226</u>
<b>Jumlah pendapatan (beban) komprehensif</b>	<u><b>1.070.739.979</b></u>	<u><b>1.298.350.529</b></u>

Gambar 6 Pendapatan (Beban) Komprehensif

Pada bagian pendapatan (beban) komprehensif terdapat penambahan pos pendapatan pajak tangguhan. Pos pendapatan pajak tangguhan adalah akumulasi dari pajak kini dan pajak tangguhan pada tahun berjalan. Menurut SAK EP, PT X mengakui aset pajak kini sebesar Rp 259,237,000 dan aset pajak tangguhan sebesar Rp 19,310,617 untuk tahun berjalan. Sehingga pendapatan pajak tangguhan yang diakui oleh PT X pada tahun 2020 sebesar Rp 278,547,617. Pada tahun 2019, PT X mengakui aset pajak kini sebesar Rp 966,962,411 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 179,776,633. Akumulasi dari pajak kini dan pajak tangguhan sebesar Rp 787,185,778 dan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Modal dasar	1.524.800.000	1.524.800.000
Modal belum ditempatkan dan disetor	-	-
<b>Modal Disetor</b>	<u><b>1.524.800.000</b></u>	<u><b>1.524.800.000</b></u>
Saldo laba awal tahun	- 3.242.451.892	- 4.621.766.267
Pembagian dividen	-	-
(Rugi) Laba tahun berjalan	<u>- 1.630.523.441</u>	<u>1.379.314.375</u>
<b>Saldo Laba Akhir Tahun</b>	<u><b>- 4.872.975.333</b></u>	<u><b>- 3.242.451.892</b></u>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<u><b>- 3.348.175.333</b></u>	<u><b>- 1.717.651.892</b></u>

Gambar 7 Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mengalami perubahan dikarenakan laba (rugi) tahun berjalan bertambah dikarenakan diakui pendapatan pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan yang diakui pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 278.547.617 dan Rp 787.185.778 untuk pada tahun 2019. Sehingga rugi bersih pada tahun 2020 menurun dari Rp 1.909.071.058 menjadi 1.630.523.441, sedangkan laba bersih tahun 2019 bertambah dari Rp 592.128.600 menjadi Rp 1.379.314.375.

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Entitas Privat

PT X LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT X LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020 Rp	2019 Rp		2020 Rp	2019 Rp
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Kas dan setara kas	71.091.817	349.615.639	Hutang usaha		
Piutang usaha - bersih			Pihak yang mempunyai		
Pihak yang mempunyai			hubungan istimewa	12.559.233.205	15.521.336.961
hubungan istimewa	583.335.622	1.702.200.977	Biaya yang masih harus dibayar	138.146.671	65.022.303
Biaya dibayar di muka	47.286.133	42.259.033	Hutang pajak	4.411.936	6.820.087
Pajak dibayar di muka	4.142.645.765	4.775.522.735	<b>Kewajiban imbalan kerja - jangka</b>		
<b>Aset pajak kini</b>	1.226.199.411	966.962.411	pendek	484.246.477	530.565.700
Persediaan			<b>Kewajiban imbalan pasca kerja -</b>		
Persediaan bahan baku	1.038.824.251	1.457.083.605	jangka pendek	64.651.008	-
Persediaan barang jadi	717.784.315	833.662.279	Hutang lain-lain		
Persediaan barang dalam proses	1.074.067.305	1.420.620.164	Pihak ketiga	311.425.000	277.799.995
Persediaan bahan pembantu	-	14.301.901	<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>13.562.114.297</b>	<b>16.401.545.046</b>
Persediaan pengemasan	11.363.636	19.293.182	<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Persediaan bahan bakar	26.181.818	25.454.545	Hutang lain-lain		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.938.780.073</b>	<b>11.606.976.471</b>	Pihak yang mempunyai		
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			hubungan istimewa	5.276.275.721	4.584.859.261
Aset tetap, setelah dikurangi			<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>	160.466.016	179.776.633
akumulasi penyusutan sebesar			<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>5.436.741.737</b>	<b>4.764.635.894</b>
Rp 9.910.048,754			<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>18.998.856.034</b>	<b>21.166.180.940</b>
(2019: Rp 8.780.396,805)	6.711.900.629	7.841.552.578	<b>EKUITAS</b>		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.711.900.629</b>	<b>7.841.552.578</b>	Modal saham - 1.600 lembar saham biasa		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>15.650.680.702</b>	<b>19.448.529.049</b>	dengan nilai nominal Rp 953.000		
			(Rp penuh) per saham		
			Modal ditempatkan dan disetor penuh		
			- 1.600 lembar saham biasa	1.524.800.000	1.524.800.000
			<b>Saldo laba</b>	- 4.872.975.332	- 3.242.451.891
			<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>- 3.348.175.332</b>	<b>- 1.717.651.891</b>
			<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>15.650.680.702</b>	<b>19.448.529.049</b>

Gambar 8 Laporan Posisi Keuangan PT X

Pada gambar 8 laporan posisi keuangan PT X, terdapat pos tambahan mengenai aset pajak kini, kewajiban imbalan kerja jangka pendek, kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek, dan liabilitas pajak tangguhan. Timbulnya aset pajak kini pada aset lancar menyebabkan kenaikan sebesar Rp 1.226.199.411 untuk tahun 2020. Bagian liabilitas jangka pendek tidak mengalami kenaikan atau pun penurunan dikarenakan hanya terjadi reklasifikasi atas biaya upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya berada pada pos biaya yang masih harus dibayar menjadi kewajiban imbalan kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja. Kewajiban imbalan kerja ini terdiri dari upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berisikan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Untuk Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun termasuk ke dalam kewajiban imbalan pasca kerja. Kemudian terdapat liabilitas pajak tangguhan pada bagian liabilitas jangka panjang sebesar Rp 160.466.016 sehingga jumlah liabilitas bertambah menjadi Rp 18.998.856.034 pada tahun 2020.

PT X LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020 Rp	2019 Rp
<b>PENDAPATAN USAHA - BERSIH</b>	32.394.349.619	53.487.920.299
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<u>-33.294.031.766</u>	<u>-51.148.105.905</u>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>- 899.682.147</b>	<b>2.339.814.394</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban penjualan	184.518.018	524.744.319
Beban administrasi	<u>1.617.063.255</u>	<u>1.734.106.228</u>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>1.801.581.273</b>	<b>2.258.850.547</b>
<b>LABA (RUGI)</b>	<b>- 2.701.263.420</b>	<b>80.963.847</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF</b>		
Pendapatan pajak tangguhan	278.547.617	787.185.778
Pendapatan bunga	274.314	10.113.192
Administrasi bank	- 97.849.797	- 95.834.015
Pendapatan (beban) komprehensif lain	<u>889.767.845</u>	<u>596.885.574</u>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif</b>	<b>1.070.739.979</b>	<b>1.298.350.529</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>- 1.630.523.441</b>	<b>1.379.314.376</b>

Gambar 9 Laporan Penghasilan Komprehensif PT X

Perubahan pada laporan penghasilan komprehensif PT X terjadi di bagian pendapatan (beban) komprehensif dengan timbulnya pendapatan pajak tangguhan. Pos pendapatan pajak tangguhan merupakan akumulasi dari akun pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini tahun 2020 sebesar Rp 259.237.000 dan pajak tangguhan sebesar Rp 19.310.617, sehingga didapatkan jumlah pendapatan pajak tangguhan tahun 2020 sebesar Rp 278.547.617.

PT X LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Modal Saham Rp	Saldo Laba Rp	Jumlah Ekuitas Rp
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>1.524.800.000</b>	<b>-4.621.766.267</b>	<b>- 3.096.966.267</b>
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	-	<u>1.379.314.376</u>	<u>1.379.314.376</u>
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.524.800.000</b>	<b>-3.242.451.891</b>	<b>- 1.717.651.891</b>
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	-	<u>-1.630.523.441</u>	<u>- 1.630.523.441</u>
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>1.524.800.000</b>	<b>-4.872.975.332</b>	<b>- 3.348.175.332</b>

Gambar 10 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas ini hanya mengalami perubahan pada bagian laba (rugi) bersih tahun berjalan dan tidak ada pos tambahan. Laba (rugi) bersih tahun berjalan tersebut berasal dari laba (rugi) komprehensif dari laporan penghasilan komprehensif.

PT X LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020 Rp	2019 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba tahun berjalan	- 1.630.523.441	1.379.314.376
Penyesuaian penghasilan nonkas dan beban:		
Beban penyusutan aset tetap	1.129.651.949	877.455.472
Beban pajak penghasilan nonkas	- 278.547.617	- 787.185.778
Perubahan dalam aset operasi dan liabilitas operasi		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha - bersih	1.118.865.355	3.759.115.721
Penurunan (kenaikan) biaya dibayar di muka	- 5.027.100	2.223.104
Penurunan (kenaikan) pajak dibayar di muka	632.876.970	- 486.683.910
Penurunan (kenaikan) persediaan	902.194.351	3.953.801.803
Kenaikan (penurunan) hutang usaha	- 2.962.103.756	- 5.832.339.221
Kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	73.124.368	- 35.051.837
Kenaikan (penurunan) hutang pajak	- 2.408.151	- 5.035.933
Kenaikan (penurunan) kewajiban imbalan kerja jangka pendek	- 46.319.223	- 58.197.400
Kenaikan (penurunan) kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek	64.651.008	-
Kenaikan (penurunan) hutang lain-lain jangka pendek	33.625.005	20.474.996
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>- 969.940.282</u>	<u>2.787.891.393</u>

  

PT X LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2020 Rp	2019 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pemrolehan aset tetap	-	- 5.047.920.159
Pengurangan aset tetap	-	-
<i>Kas neto dari aktivitas investasi</i>	<u>-</u>	<u>- 5.047.920.159</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran hutang lain-lain jangka panjang	691.416.460	2.470.193.528
<i>Kas neto dari aktivitas pendanaan</i>	<u>691.416.460</u>	<u>2.470.193.528</u>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<u>- 278.523.822</u>	<u>210.164.762</u>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<u>349.615.639</u>	<u>139.450.877</u>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>71.091.817</u>	<u>349.615.639</u>

Gambar 11 Laporan Arus Kas PT X

Pada laporan ini, terdapat beberapa perbedaan yang berasal dari aktivitas operasi. Perbedaan yang pertama adalah munculnya akun beban pajak penghasilan non kas pada penyesuaian penghasilan non kas dan beban. Saldo beban pajak penghasilan non kas berasal dari jumlah pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan akun pendapatan pajak tangguhan yang ikut menambahkan laba perusahaan namun tidak memberikan arus kas masuk.

Perbedaan lainnya terdapat pada perubahan dalam aset operasi dan liabilitas operasi. Hal ini terdapat pada kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian laporan posisi keuangan sebelumnya, akun biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan dari laporan arus kas berdasarkan SAK ETAP yang dikarenakan adanya reklasifikasi akun upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan. Reklasifikasi ini menyebabkan akun kewajiban imbalan kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja mengalami kenaikan untuk tahun 2020.

## KESIMPULAN

PT X merupakan perusahaan manufaktur di bidang tekstil pakaian yang berfokus pada pasar ekspor dan domestik. PT X menerapkan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangannya sehingga didapatkan jumlah aset tahun 2020 sebesar Rp 14.424.481.293, jumlah kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 18.838.390.018 dan jumlah ekuitas tahun 2020 sebesar -Rp 4.413.908.726. Rugi bersih sebelum pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.909.071.058.

Penerapan SAK Entitas Privat terhadap penyusunan laporan keuangan PT X menyebabkan beberapa perubahan dan pos baru yang muncul. Terdapat pos mengenai pajak kini, pajak tangguhan, kewajiban imbalan kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja yang muncul dan terdapat pos biaya yang masih harus dibayar, ekuitas dan pendapatan (beban) komprehensif yang mengalami perubahan. Penerapan SAK Entitas Privat ini menyebabkan aset lancar dan liabilitas jangka panjang tahun 2020 meningkat menjadi Rp 8.938.780.073 dan Rp 5.436.741.737. Pendapatan (beban) komprehensif juga mengalami peningkatan sehingga rugi komprehensif mengecil menjadi -Rp 1.630.523.441. Kenaikan pendapatan (beban) komprehensif itu dikarenakan adanya pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp 278.547.617. Perubahan yang disebabkan oleh SAK Entitas Privat ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif disertai dengan perhitungan dan penjelasan yang lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan PSAK 24: Imbalan Kerja*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat*.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (F. Husaini, Ed.; 1st ed.). ANAK HEBAT INDONESIA.
- Khodijah, S., & Linawati. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Pt. Dea Lova Indonesia. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi*, 2(1), 88–99. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpia/index>
- Lijow, T. F., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 9(2), 139–147. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33284>
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. UNPAM PRESS. [http://eprints.unpam.ac.id/8810/1/SAK45301\\_AKUNTANSI%20PERPAJAKAN.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8810/1/SAK45301_AKUNTANSI%20PERPAJAKAN.pdf)
- Ramadhan, R. E. (2021). *Analisis Perbandingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes dengan Menggunakan PSAK EMKM dengan PSAK Entitas Privat: Studi Pada BUMDes Klirong Makmur, Desa Klirong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan 2020* [STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara]. <http://repository.stieykpn.ac.id/1711/>
- Republik Indonesia. (2020). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. [www.wileypluslearningspace.com](http://www.wileypluslearningspace.com)
- Situs resmi IAI*. (n.d.). Retrieved February 3, 2022, from <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.
- Supriyanto, E. (2011). *AKUNTANSI PERPAJAKAN* (01 ed.). Graha Ilmu. [https://perpus.stiehidayatullah.ac.id/file\\_ebook/Akuntansi%20Perpajakan.pdf](https://perpus.stiehidayatullah.ac.id/file_ebook/Akuntansi%20Perpajakan.pdf)
- Susanto, Zarefar, A., & Ali, F. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 41–50. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3601>